

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, empat pilar politik hijau yang digunakan dalam menganalisis kasus ekosida di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2021 telah menunjukkan bahwa kasus ekosida yang terjadi di Indonesia merupakan risiko lingkungan yang harus dihadapi oleh masyarakat luas akibat sistem ekonomi ekstraktif, pengaruh oligarki yang kuat dalam pemerintahan, dan ditinggalkannya agenda lingkungan dalam proses politik negara.

Pembuat kebijakan telah secara terang-terangan tidak menjadikan keberlanjutan **ekologi** sebagai agenda utama dan lebih mementingkan agenda ekonomi dan pembangunan, sehingga membuat lingkungan mengalami krisis yang menyebabkan bencana-bencana lainnya menjadi tidak terhindarkan. Khususnya berkaitan dengan konsep ekosida yang ternyata belum mendapatkan perhatian dari pemerintah sampai saat ini. Padahal, Indonesia merupakan negara yang sangat berpengaruh pada perubahan iklim dunia. Selain itu, politik, ekonomi, dan lingkungan juga merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan atau ditinggalkan salah satunya dalam pengelolaan negara. Proses politik, ekonomi dan pembangunan seharusnya dilakukan **tanpa kekerasan**, tetapi tindakan ekosida secara struktural yang terjadi di Indonesia baik secara sengaja maupun tidak disengaja sudah menciptakan tindakan kekerasan kepada lingkungan dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga masih menggunakan kekerasan dalam menjalankan kebijakannya. Misalnya, membiarkan kekerasan yang dilakukan aparat kepada peserta unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja. Tindakan pemerintah yang tidak mengutamakan keberlanjutan ekologi juga telah menjadi keresahan bagi banyak kelompok masyarakat, khususnya aktivis lingkungan. Mereka aktif menyuarakan keresahan dan tuntutan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan melalui kampanye dan advokasi. Hal tersebut merupakan bentuk hak mengutarakan pendapat yang mereka miliki atas prinsip **demokrasi akar rumput** yang seharusnya berjalan di Indonesia. Tetapi, mereka harus menghadapi risiko yang besar karena menghadapi pemerintah yang berpihak pada oligarki dan memilih menutup ruang demokrasi dalam proses politik, khususnya dalam pembuatan kebijakan. Dengan begitu, pemerintah telah melewatkan risiko dampak pada lingkungan dan masyarakat. Kecerobohan pembuat kebijakan yang membiarkan kekerasan terjadi di atas prinsip demokrasi akar rumput dan menyebabkan kerugian pada alam dan manusia telah menunjukkan bahwa proses politik di Indonesia

masih sangat jauh dari elemen-elemen politik hijau, dan pembuat kebijakan telah bertanggung jawab atas krisis lingkungan yang terjadi akibat kebijakan yang mereka buat tanpa memedulikan protes dari masyarakat. Maka dari itu perspektif politik hijau menempatkan pembuat kebijakan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis lingkungan di Indonesia yang telah berdampak pada lingkungan global. Kebijakan yang mengesampingkan kepentingan lingkungan dan menciptakan sistem pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada mereka yang mendapatkan keuntungan paling sedikit dari prosesnya. Hal ini pada akhirnya akan mengorbankan penduduk miskin dan menciptakan ketimpangan yang dapat menghilangkan **keadilan sosial** bagi masyarakat yang terdampak tersebut.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang ditulis, penelitian ini terbatas pada level analisis negara, sehingga hanya berfokus pada perilaku negara yang terbentuk dari karakteristik proses politik pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2021. Bagi para peneliti yang tertarik pada pembahasan serupa, penelitian lebih lanjut bisa dilakukan mengenai perkembangan diskursus ekosida baik di nasional maupun internasional; perkembangan agenda lingkungan dalam visi politik pemerintah; atau mengenai peran penting politik hijau sebagai pencegahan ekosida. Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi penulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dengan memperkenalkan konsep ekosida dan politik hijau kepada pembaca. Melalui penelitian ini juga penulis berusaha berkontribusi dalam upaya yang sedang dilakukan aktivis lingkungan di Indonesia untuk memperbanyak sumber literasi mengenai ekosida sebagai dukungan terhadap kampanye untuk menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional kelima.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti membuat beberapa saran yang bisa digunakan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia seharusnya memiliki pemahaman mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan, bahaya ekosida bagi bumi, dan pentingnya berpihak pada HAM.
2. Pemerintah Indonesia hendaknya menjadi bagian dari pihak yang memperkenalkan ekosida kepada masyarakat, dan dapat memberikan pengawasan ketat kepada korporasi, mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

3. Akademisi dengan ketertarikan pada isu lingkungan bisa bersama-sama mulai mengembangkan diskursus dan menambah sumber literasi mengenai ekosida yang bisa membantu masyarakat lebih mengenal konsep baru ini.
4. Pembaca dari berbagai kalangan yang menemukan kesadarannya mengenai isu lingkungan akan lebih baik jika ikut menyebarkannya juga, memberikan penerangan pada lebih banyak orang melalui sosial media, tulisan ilmiah, ataupun media massa.

